

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danil, Elwi, 2021, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas (Cetakan Ketujuh)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris, Dr. Freddy dan Teddy Anggoro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, “*Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.”, KPK, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poernomo, Sri Lestari, 2022, *Hukum Dagang*, Ed Publisher.
- Prayoko, Robert, 2015, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rawls, John, 1921, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, United States of America.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Terjemahan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samad, Feri Setiawan, 2011, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Aryanti, Ni Wayan Desi, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Saham Pemerintah dalam Perusahaan Milik Negara (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Singapura)”, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Balotti, R. Franklin, dan James J. Hanks, Jr, “Rejudging the Business Judgment Rule”, *The Business Lawyer*, Vol. 48, Agustus, 1993.
- Destria, Dhita, “Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip *Good Corporate Governance*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, Maret 2021.
- E.P, Martha Vivy, *et.al.*, “Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit”, *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, Februari – Mei, 2013, Vol. 1, No. 1.
- Eprianti, Nanik, “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Non Performing Financing”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 , No. 2, Juli, 2019.

- Hadi, Shigeko Putri, et.al., “Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumh Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.
- Hidayat, Maulana Hasanudin, “Badan Hukum, Separate Legal Entity, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan”, *National Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Irawan, Chandra Noviardy, et.al., “Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases”, *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Kaihatu, Thomas S., “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2006.
- Kusmono, “Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip *Business Judgement Rule* Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian”, *Jurnal Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*
- Mahyani, Ahmad, “Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN yang Merugi”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2019.
- Mantese, Gerard V., dan Emily S. Fields, “The Business Judgment Rule”, *Michigan Bar Journal*, Januari, 2020.
- Moertiono, Raden Juli, “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik dalam Kerja Sama”, *Prosiding Seminar Nasional & Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2019.
- Prasetio, “Dilema Penerapan Business Judgment Rule dalam Transaksi Komersial BUMN”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia*, Vol. 1, Juli, 2021.
- Rokhim, Abdul, “Tindakan “Ultra Vires” Direksi Dan Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.
- Rukmono, Bambang Sugeng dan Soehartono, “Some Problems in the Implementation of Business Judgment Rule Principles to the Directors of State-Owned Enterprises in Indonesia”, *Advances in Social Science, Education, dan Humanities Research*, Vol. 358, 2019.
- Simbolon, Alum, “Penerapan Business Judgment Rule di Indonesia”, *Sipendikum*, 2018.
- Subekti, Trusto, “Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1 Januari 2008.
- Yusuf, Muhammad, “Batasan Makna tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Desember, 2020.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Fauziah, Alvia Husna, 2019, *Director's Responsibility Towards Financial Loss Suffered by State-Owned Enterprises (Persero) According to Business Judgment Rule*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Hambali, Nurul Fauziah, 2018, *Penerapan Business Judgement Rule Terkait Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saputra, Sudharmono, 2017, *Kepastian Hukum dalam Penerapan Business Judgment Rule berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Direksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

- CNBC Indonesia, “Kronologi Sofyan Basir Jadi Tersangka Suap PLTU Riau I”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190424192442-16-68681/kronologi-sofyan-basir-jadi-tersangka-kasus-suap-pltu-riau-i> diakses 25 Oktober 2022.
- Databoks, “Ini Kelompok Pelaku Korupsi di Lingkungan BUMN”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/ini-kelompok-pelaku-korupsi-di-lingkungan-bumn> diakses 17 Mei 2022.
- Fadhilah, Muhammad Iqbal, “Akibat Hukum Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Studi Pada Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Lelang BUMN di Bidang Perbankan)”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13225/Akibat-Hukum-Pengelolaan-Kekayaan-Negara-yang-Dipisahkan-Studi-Pada-Penetapan-Pelaksanaan-Eksekusi-Lelang-BUMN-di-Bidang-Perbankan.html> diakses 17 Mei 2022.
- Kementerian ESDM, “Mengenai Ekonomi Migas (2): Resiko Pengusahaan Migas”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/mengenal-ekonomi-migas-2-resiko-pengusahaan-migas> diakses 2 Oktober 2022.
- Kompas, “Perjalanan Kasus PLTU Riau-1 Hingga Vonis Bebas Sofyan Basir”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/04/14170361/perjalanan-kasus-pltu-riau-1-hingga-vonis-bebas-sofyan-basir> diakses 25 Oktober 2022.
- Kompas.com, “Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp23,7 Triliun”, <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/030400326/ini-kronologi-korupsi-asabri-yang-merugikan-negara-rp-23-7-triliun?page=all> diakses 4 Oktober 2022.
- Prahassacitta, Vidya, “Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> diakses 12 Desember 2022.
- Tirto.id, “KPK Tahan RJ Lino Usai 5 Tahun Jadi Tersangka Korupsi Pelindo”, <https://tirto.id/kpk-tahan-rj-lino-usai-5-tahun-jadi-tersangka-korupsi-pelindo-gbxd> diakses 16 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106)

Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Permen BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pid.B/TPK/2012/PN JKT.PST perihal perkara tindak pidana korupsi Hotasi Nababan

Putusan Mahkamah Agung No. 417K/Pid.sus/2014 perihal Kasasi perkara tindak pidana korupsi Hotasi Nababan

Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pid.Sus/2015 perihal Peninjauan Kembali perkara tindak pidana korupsi Hotasi Nababan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 93/Pi.Sus-TPK/2017/PN JKT.PST perihal perkara tindak pidana korupsi Libra Widiarto

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST perihal perkara tindak pidana korupsi Sofyan Basir

Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 perihal Kasasi perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan

Putusan Mahkamah Agung No. 1111 K/Pid.Sus/2020 perihal Kasasi perkara tindak pidana korupsi Sofyan Basir

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.PST perihal perkara tindak pidana korupsi RJ Lino

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/Pid.sus-TPK/2021/PN JKT.PST perihal perkara tindak pidana korupsi Sonny Widjaja

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.PST perihal perkara tindak pidana korupsi Adam Rachmat Damiri